



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

LAPORAN KINERJA 2024

TRIWULAN III



KATA PENGANTAR



Ir. Ririn Sugihariyati

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Triwulan III 2024 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi disusun untuk melaporkan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Periode Triwulan III Tahun 2024 terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja guna terwujudnya *good governance* di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2024.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan III 2024, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel terkait pelaporan kinerja di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan capaian kinerja pada periode berikutnya dapat lebih ditingkatkan, baik pelaksanaan tugas dan fungsi maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami terus berupaya menyempurnakan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan penyajian Laporan Kinerja di masa mendatang.

Trenggalek, 14 Oktober 2024

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Prigi



Ririn Sugihariyati



DAFTAR ISI



	Page
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan	3
1.3. Tugas dan Fungsi	3
1.4. Aspek Strategis	5
1.5. Sistematika Penyajian Laporan	6
BAB II. PERENCANAAN KEGIATAN	
2.1. Rencana Strategis 2020-2024	7
2.2. Arah Kebijakan dan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	9
2.3. Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	11
2.4. Target Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2. Analisis Capaian Kinerja	15
3.3. Akuntabilitas Keuangan	42
BAB IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	45
4.2. Tindak Lanjut Periode Sebelumnya	46
4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut	46
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL



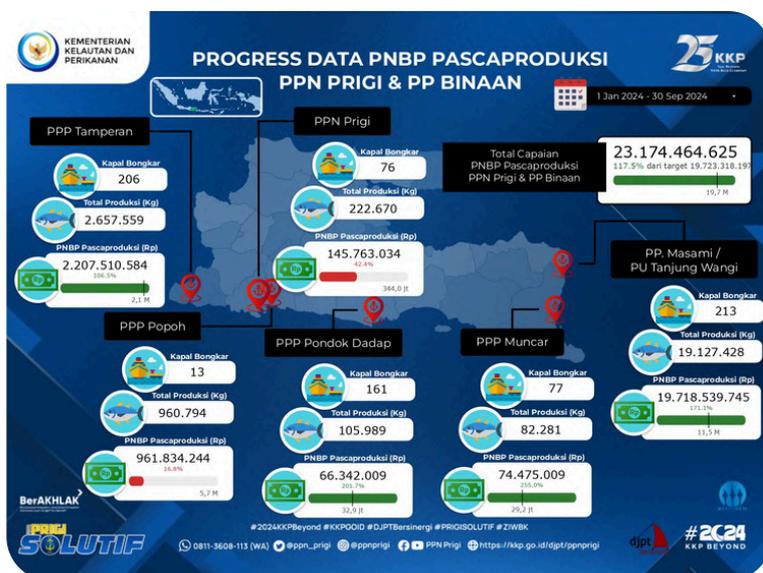
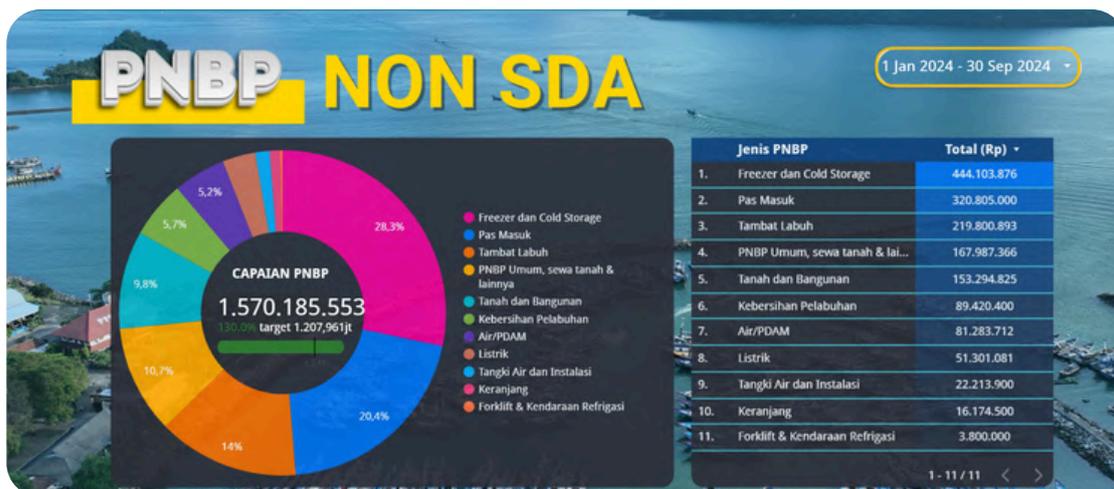
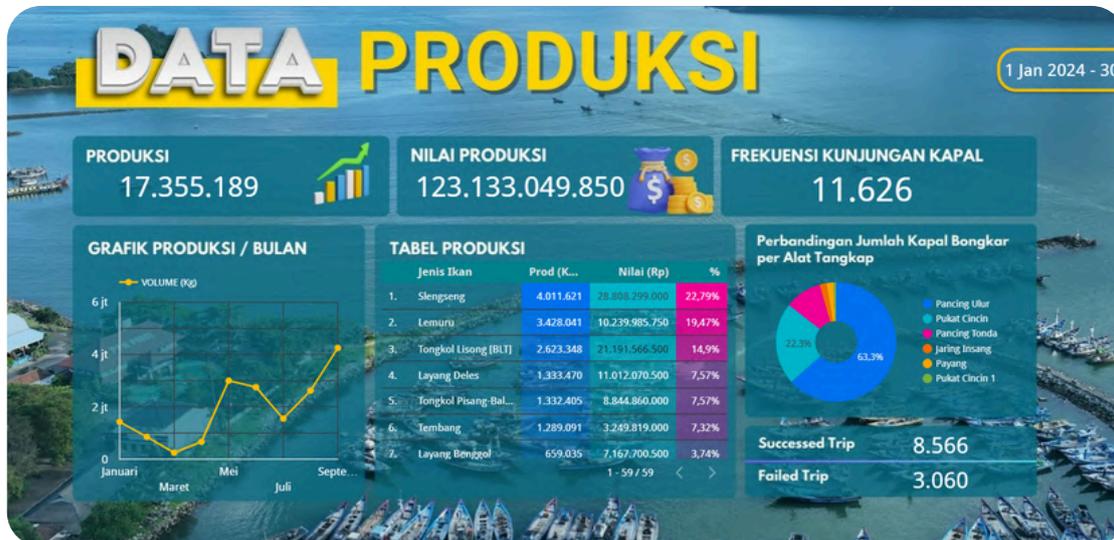
	Page
Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) Tahun 2024	11
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Triwulan III 2024	14
Tabel 3. Capaian IK "Penerimaan PNB di PPN Prigi" Triwulan III 2024	15
Tabel 4. Realisasi Penerimaan PNB Triwulan III 2024	16
Tabel 5. Capaian IK "Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Prigi" Triwulan III 2024	18
Tabel 6. Volume Produksi Perikanan per Bulan per Alat Tangkap di PPN Prigi Triwulan III 2024	19
Tabel 7. Capaian IK "Nilai Tingkat Kinerja PPN Prigi" Triwulan III 2024	20
Tabel 8. Capaian IK "Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Prigi" Triwulan III 2024	21
Tabel 9. Capaian IK "Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan" Triwulan III 2024	27
Tabel 10. Capaian IK "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Prigi" Triwulan III 2024	32
Tabel 11. Rekapitulasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Triwulan III 2024	33
Tabel 12. Capaian IK "Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Prigi" Triwulan III 2024	34
Tabel 13. Penyerapan Anggaran berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan Utama Triwulan III 2024	43
Tabel 14. Penyerapan Anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan Triwulan III 2024	43

DAFTAR GAMBAR



	Page
Gambar 1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	5
Gambar 2. <i>Dashboard</i> Kinerja Tahun 2024 Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	13
Gambar 3. PNBP Triwulan III 2024 Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	15
Gambar 4. Perbandingan Penerimaan PNBP 2019-2024	16
Gambar 5. Volume Produksi Perikanan Tangkap Triwulan III 2024	19
Gambar 6. Perbandingan Volume Produksi Tahun 2019 - 2024	19
Gambar 7. Perbandingan Nilai Tingkat Kinerja PPN Prigi Tahun 2019-2024	22
Gambar 8. Penerbitan SKKP per Pelabuhan Perikanan s.d. Triwulan III 2024	28
Gambar 9. Perbandingan Capaian Nilai SKM Tahun 2019-2024	41

EXECUTIVE SUMMARY



TINGKAT KINERJA PELABUHAN

96,25

NILAI SELARSKAN

93,29

PENERBITAN SKKP

433

NILAI SKM

92,84





BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja. Sistem Kinerja Instansi Pemerintah juga bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk memperoleh informasi kinerja penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan perbaikan akuntabilitas kinerja.

Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pemenuhan kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Program pengelolaan perikanan dan kelautan dilaksanakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2024 yang pertanggungjawabannya harus dilakukan secara akuntabel dan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran berbentuk laporan yang berisi penerapan manajemen kinerja dan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulanan dan tahunan). Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.



Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi merupakan salah satu dari 22 (dua puluh dua) Pelabuhan Perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi melaksanakan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu :

- Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan.
- Pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan
- Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan
- Pengelolaan Sumber Daya Ikan
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni : (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang disusun setiap Tahun.

Berkaitan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Triwulan III 2024 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tahun 2024 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini adalah salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) bisa diwujudkan.

1.2. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelabuhan perikanan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Dasar hukum pengelolaan pelabuhan perikanan antara lain :

- Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Tahun 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108 Tahun 2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.

Fungsi pemerintahan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, seerta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan. Fungsi pemerintahan Pelabuhan Perikanan sebagai berikut :

- Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- Pelayanan pembinaan dan pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan;
- Pengumpulan data tangkapan hasil perikanan;
- Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan, yang meliputi pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan kegiatan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- Pelaksanaan keselamatan dan keamanan operasional kapal perikanan dan membantu pengendalian sumber daya ikan;
- Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan, yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja;
- Pelaksanaan publikasi operasional pelabuhan perikanan, hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
- Pelaksanaan pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;
- Fasilitasi tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
- Fasilitasi tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- Fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- Fasilitasi tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
- Fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kesehatan;
- Fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kepabebean dan/atau;
- Fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi keimigrasian;
- Fungsi lainnya terkait dengan pengelolaan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi perusahaan pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan. Fungsi perusahaan pelabuhan perikanan yaitu :

- Pelayanan bongkar muat;
- Pelayanan pengolahan hasil perikanan;
- Pemasaran dan distribusi ikan;
- Penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan perikanan;
- Pelayanan *docking* dan galangan kapal perikanan;
- Pelayanan logistik dan perbekalan awak kapal perikanan dan kapal perikanan;
- Penyelenggaraan wisata bahari;
- Fasilitasi tempat pelayanan lembaga keuangan; dan/atau
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 64/KEPMEN-KP/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108/KEPMEN-KP/2020 tentang Peta Jabatan dan lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

1.4. Aspek Strategis

Aspek Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dalam mendukung kebijakan pembangunan perikanan tangkap Tahun 2020 – 2024 sesuai dengan renstra DJPT adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan;
- Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang kompeten, professional, dan berintegritas;
- Terkelolanya anggaran pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi secara efisien dan akuntabel.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi disusun dengan sistematika sebagai berikut :



Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, menyajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai visi, misi, dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja, dan targetnya) dalam Rencana Jangka Menengah (RPJM/Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan Penetapan Kinerja (PK) pada periode triwulan tertentu.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran / tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

Bab IV Penutup, pada bagian ini diuraikan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi, tindak lanjut rekomendasi periode sebelumnya, serta rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran, pada bagian ini dilampirkan dokumen perjanjian kinerja, penghargaan yang diperoleh, serta dokumen kinerja lainnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA



2.1. Rencana Strategis 2020 – 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam lima tahun kedepan meliputi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memiliki peran strategis untuk mendukung fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan berbagai upaya akselerasi pembangunan perikanan tangkap selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, pendapatan, serta tingkat konsumsi ikan, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut : **“Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan kedalam misi, strategi, dan upaya-upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan. Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ditetapkan sebagai berikut:

- **Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**, melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap;
- **Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap;
- **Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**, melalui Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap;
- **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT



Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah :

- **Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**, yaitu meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM perikanan tangkap, termasuk memberdayakan nelayan;
- **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap**, yaitu : Optimalnya integrasi pengembangan infrastruktur dan operasionalisasi Pelabuhan perikanan; Mengembangkan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif; Mengakselerasi reformasi tata Kelola dan perizinan usaha perikanan tangkap;
- **Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap**, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
- **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT**, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secara berkualitas.

Dalam mendukung peran strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditetapkan visi dan misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2020 – 2024. Adapaun visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk **“Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**. Pelabuhan Perikanan melaksanakan 4 (empat) misi Presiden, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan uraian sebagai berikut :

- **Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
- **Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
- **Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Menjabarkan misi tersebut, maka tujuan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi adalah :

- Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap, yaitu penumbuhan kewirausahaan dan fasilitasi akses pendanaan/ permodalan bagi nelayan, penguatan ketahanan pangan, pengentasa kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan nelayan;

- Membangun struktur ekonomi perikanan tangkap yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, yaitu pembangunan struktur ekonomi pada sub bidang perikanan tangkap, melalui fasilitasi pengelolaan SDI berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan;
- Mencapai lingkungan hidup sumber daya perikanan yang berkelanjutan pada bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan, menyediakan sistem data dan informasi pengelolaan perikanan tangkap yang akurat dan terkini serta mendukung implementasi konsep *eco-infrastructure*;
- Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya di lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

2.2. Arah Kebijakan & Sasaran Kegiatan PPN Prigi

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan perikanan tangkap yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha perikanan tangkap secara berdaulat, bertanggungjawab, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi menerapkan strategi dengan menetapkan Sasaran Kegiatan yang dapat digunakan sebagai acuan selama lima tahun sebagai suatu outcome/impact dari program kegiatan yang dilaksanakan.

Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi merupakan bagian dari Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam operasional organisasi, dengan pengukuran dan penilaian kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut :

- Sasaran Kegiatan 1 **“Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkat” dengan Indikator Kinerja : Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Sasaran Kegiatan 2 **“Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Meningkat”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat”, dengan Indikator Kinerja : Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;

- Sasaran Kegiatan 3 **“Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Berdaya Saing”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan dan Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkatkan”, dengan Indikator Kinerja : Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Sasaran Kegiatan 4 **“Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkatkan” dengan Indikator Kinerja : Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dan Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Sasaran Kegiatan 5 **“Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab” dengan Indikator Kinerja : Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan;
- Sasaran Kegiatan 6 **“Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi / Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkatkan” dengan Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan;
- Sasaran Kegiatan 7 **“Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap” dengan Indikator Kinerja : Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja: Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

2.3. Indikator Kinerja PPN Prigi

Indikator kinerja merupakan nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan.

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Tujuan umum Perjanjian Kinerja adalah 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 3) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 4) Sebagai dasar pemberian penghargaan dan atau sanksi (*reward and punishment*). Penetapan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

2.4. Target Kinerja PPN Prigi

Indikator kinerja merupakan alat ukur pencapaian tujuan / sasaran atau indikasi atau ciri-ciri bahwa kinerja tercapai. Target adalah target kinerja atas indikator, sedangkan program/kegiatan adalah cara untuk mencapai target kinerja.

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran dengan dilengkapi indikator kinerja yang akan dicapai. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kegiatan kinerja spesifik yang akan dicapai meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Nilai PNBPN sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	1 Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Rp Juta)	1.207,96
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi meningkat	2 Volume produksi perikanan tangkap triwulan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)	20.046
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Berdaya Saing	3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	100
		4 Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	84

Lanjutan Tabel 1

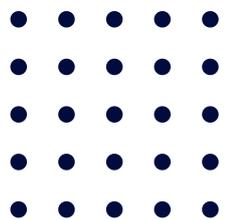
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Berdaya Saing	5 Nelayan/ awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/ kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan (Orang)	45
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal	6 Persentase pengendalian fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	70
		7 Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	30,01
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	8 Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	377
6	Pengelolaan awak kapal perikanan yang terfasilitasi / terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	9 Persentase peningkatan pengetahuan kompetensi dan perlindungan nelayan / awak kapal perikanan (Persen)	24,5
7	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan	10 Nilai PM pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	80
		11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80
		12 Nilai rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	94
		13 Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	84
		14 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80
		15 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80
		16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	93,76
		17 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	86
18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	88,30		

Dalam melaksanakan capaian kinerja dari target yang telah ditentukan, terdapat beberapa kegiatan pendukung untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun kegiatan pendukung tersebut terdapat pada dokumen Rencana Aksi sebagaimana terdapat pada **Lampiran 2**.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



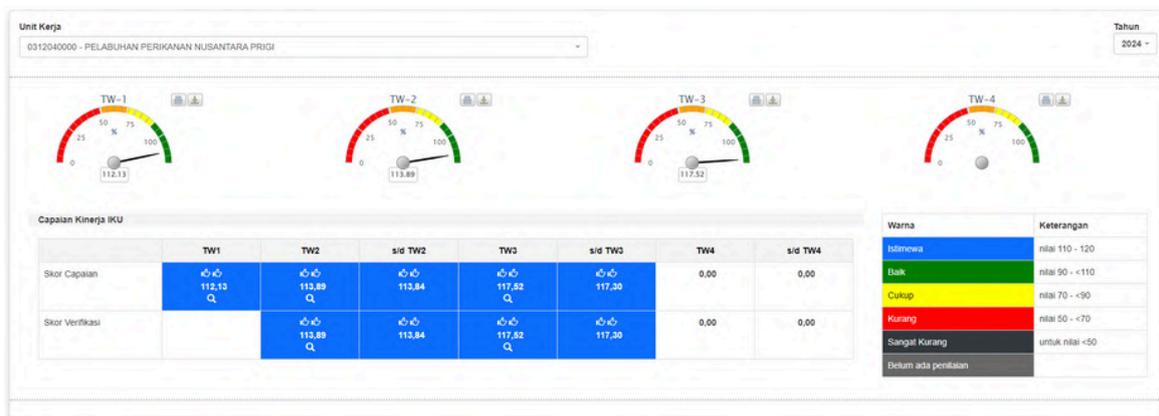
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi unit kerja dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi harus dapat dipertanggungjawabkan pencapaiannya, baik itu berupa keberhasilan maupun kegagalan. Hal tersebut sebagai bagian dari perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip akuntabilitas dimaksudkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bertanggung jawab dimana instansi pemerintah dan aparaturnya harus dapat mempertahankan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kegiatan pembangunan perikanan tangkap tahun 2024 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi menitikberatkan pada 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.



Gambar 2. Dashboard Kinerja Tahun 2024 Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi pada triwulan III tahun 2024 memiliki kategori "ISTIMEWA", ditandai dengan Nilai Capaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 117,52% dan sampai dengan Triwulan III sebesar 117,30%. Capaian ini merupakan gambaran nilai kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pada triwulan III tahun 2024, seluruh indikator kinerja atau sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja dengan pengukuran capaian bersifat triwulan tercapai ($\geq 100\%$). Sedangkan 11 (sebelas) indikator kinerja lainnya bersifat semesater dan tahun. Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja PPN Prigi Triwulan III 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
			2024	TW III	TW III	%
1	Nilai PNBP sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Rp Juta)	1.207,96	945,68	1.570,19	166,04
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)	20.046	14.317,20	17.355,19	121,22
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Berdaya Saing	3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	100			
		4 Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	84	84	96,25	114,58
		5 Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	45			
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang optimal	6 Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	70			
		7 Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	30,10	30,10	93,29	309,93
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	8 Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	377	367	433	117,98
6	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	9 Persentase peningkatan pengetahuan kompetensi dan perlindungan nelayan / awak kapal perikanan (Persen)	24,5			
7	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan	10 Nilai PM pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	80			
		11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80	80	100	125
		12 Nilai rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	94			
		13 Indeks profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	84			
		14 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80			
		15 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80			
		16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	93,76			
		17 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	86			
18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	88,30	88,30	92,84	105,14		

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Periode triwulan III tahun 2024, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan (SK) 1 – Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Prigi

Indikator Kinerja (IK) pada SK 1 yaitu Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Indikator Kinerja (IK) 1 – Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Prigi

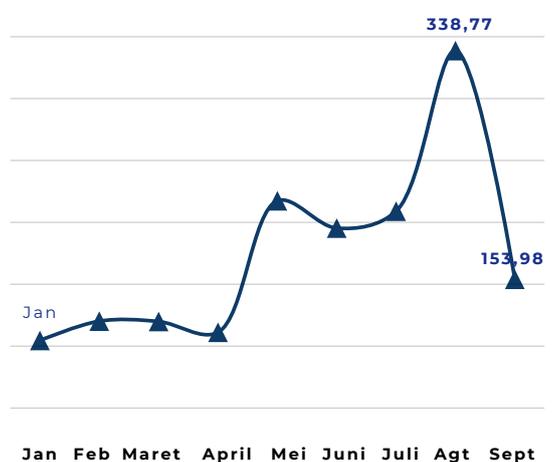
Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi/badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan/pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara di sektor kelautan dan perikanan. PNBP PPN Prigi terdiri atas penerimaan umum dan fungsional.

Penghitungan nilai PNBP sektor perikanan tangkap di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 3. Capaian IK “Penerimaan PNBP di PPN Prigi” Triwulan III 2024

SK 1		Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi								
IK 1		Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi								
Realisasi Tahun 2019– 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi		
TW III Tahun 2019	TW III Tahun 2020	TW III Tahun 2021	TW III Tahun 2022	TW III Tahun 2023	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra	
380	478	670,51	1.183	1.397,05	945,68	1.570,19	166,04%	508	309,09%	

Pada triwulan III tahun 2024, capaian indikator kinerja “Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” sebesar Rp 1.570,19 juta atau sebesar 166,04% dari target triwulan III tahun 2024. Penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2024, dimana pada bulan Agustus terdapat peningkatan PNBP yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan penerimaan PNBP bulan Juli 2024 karena adanya peningkatan pada penerimaan jasa tambat dan labuh sebesar 224,53%. Sedangkan berdasarkan



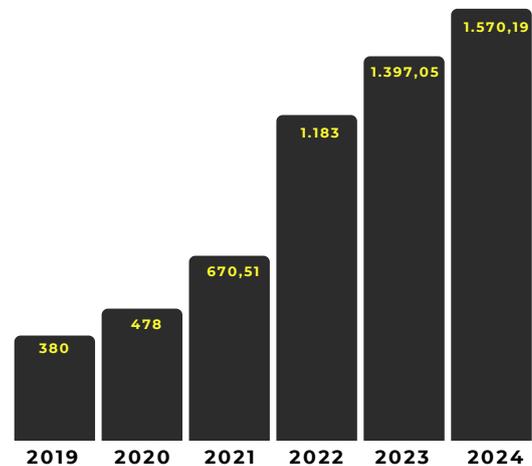
Gambar 3. PNBP Triwulan III PPN Prigi

jumlah penerimaan PNBП sampai dengan triwulan III 2024, penerimaan tertinggi terdapat pada pelayanan penggunaan ruang pendingin, *freezer*, dan *cold storage* yaitu sebesar Rp 444.103.876,00 atau 28,28% dari total penerimaan PNBП sampai dengan triwulan III 2024 serta jika dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya meningkat sebesar 22,95%. Hal ini sebanding dengan peningkatan volume produksi yang terjadi pada triwulan III 2024. Penerimaan terbesar kedua yaitu pelayanan jasa pas masuk (sekali masuk dan berlangganan) sebesar Rp 320.805.000,00 atau 20,43% dari total PNBП sampai dengan triwulan III tahun 2024. Penerimaan PNBП Non SDA dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4. Realisasi Penerimaan PNBП Triwulan III 2024

ANGGARAN	JENIS JASA	TARGET 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)
PNBП FUNGSIONAL		1.207.961.000	1.402.198.187
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai TUSI	562.060.000	639.587.101
	Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan	152.121.000	153.294.825
	Pelayanan Penggunaan Peralatan dan Mesin	409.939.000	482.992.276
	Pelayanan Penggunaan Transportasi	25.200.000	3.800.000
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	645.901.000	762.611.086
	Pelayanan Tambat untuk Kapal Perikanan	243.462.000	138.402.513
	Pelayanan Labuh untuk Kapal Perikanan	-	81.398.380
	Pelayanan Jasa Pengadaan Air/PDAM	62.958.000	81.283.712
	Pelayanan Bengkel	8.640.000	-
	Pelayanan Jasa Pas Masuk Harian Sekali Masuk	144.154.000	271.905.000
	Pelayanan Jasa Pas Masuk Berlangganan	36.270.000	48.900.000
	Pelayanan Jasa Kebersihan Pelabuhan	109.220.000	89.420.400
	Pelayanan Pelabuhan (Batang Tubuh) (Pemakaian Listrik)	41.197.000	51.301.081
PNBП UMUM			167.987.366
425122	Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin	-	82.406.500
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	75.807.252
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	-	2.493.288
425911	Pendapatan Pengembalian Belanja Pegawai TYL	-	740.200
425912	Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Barang TYL	-	6.540.000
JUMLAH PNBП FUNGSIONAL DAN UMUM		1.207.961.000	1.570.185.553

Jika dibandingkan dengan capaian triwulan III tahun 2019 – 2021, peningkatan penerimaan PNBП triwulan III tahun 2024 berkisar antara 134,18% – 313,21%. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, dimana penerapan tarif PNBП menggunakan peraturan yang sama (PP 85 Tahun 2021), penerimaan PNBП triwulan III tahun 2024 mengalami peningkatan Rp 387,19 juta atau 32,73% dibandingkan capaian triwulan III tahun 2022 dan peningkatan Rp 173,14 juta atau 12,39% dibandingkan triwulan III 2023.



Gambar 4. Perbandingan Penerimaan PNBП 2019-2024



Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian PNBP triwulan III tahun 2024 sebesar 309,09%. Perbandingan dengan target Renstra memiliki persentase yang tinggi. Hal ini dikarenakan target Renstra yang digunakan masih menggunakan acuan lama (belum menggunakan dasar penghitungan PP 85 tahun 2021). Sehingga perlu dilakukan Reviu Renstra menyesuaikan dengan perubahan-perubahan aturan yang ada.

Sedangkan perbandingan dengan capaian penerimaan PNBP pada satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian PNBP PPN Prigi sebesar 120,76% dimana capaian PPN Palabuhanratu sebesar Rp 1.300,29 juta. Salah satu faktor pendukung penerimaan PNBP di PPN Prigi yaitu penggunaan ruang pendingin, *freezer* yang cukup tinggi. Akan tetapi, pada penerimaan jasa lainnya, seperti penerimaan jasa tambat labuh dan pengadaan air PDAM penerimaan PPN Prigi lebih rendah.

Faktor penentu keberhasilan capaian indikator kinerja ini didukung oleh komitmen para petugas pelayanan jasa di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Selain itu, tercapainya penerimaan PNBP triwulan III didukung oleh peningkatan penerimaan yang cukup signifikan pada jasa tambat labuh serta jasa *cold storage* dan ruang berpendingin.

Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu capaian rata-rata pada penerimaan jasa tanah bangunan pada triwulan III mengalami penurunan karena adanya transisi mekanisme penggunaan menjadi pemanfaatan.

Dalam rangka optimalisasi capaian penerimaan PNBP Non-SDA, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan antara lain melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap jenis pelayanan jasa yang belum memenuhi target.

Dalam pencapaian target Indikator Kinerja ini, didukung anggaran sebesar Rp 186.602.000,00. Sampai dengan triwulan III, realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 87.640.000,00 atau 46,97% dari total anggaran. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran akan dihitung pada akhir tahun anggaran. Pencapaian Indikator Kinerja ini didukung oleh 13 (tiga) belas orang SDM dengan 8 (delapan) jenis pelayanan jasa yang diberikan.

Pencapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh adanya aplikasi SIJAKA (Sistem Jasa Kepelabuhanan) yang telah terintegrasi dengan aplikasi TEMAN SPB dan SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online) sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pembayaran tambat labuh.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu program pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di Pelabuhan Perikanan yang meliputi kegiatan :

- Pengadaan sarana penunjang PNBP pasca produksi;
- Pelabuhan Perikanan yang dikelola dan operasional sesuai standar;
- Kegiatan peningkatan pelayanan di Pelabuhan Perikanan dalam rangka mendukung PIT;
- Desiminasi pelayanan jasa sesuai dengan aturan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan III 2024 yaitu monitoring dan evaluasi pengguna jasa, diseminasi pelayanan jasa sesuai peraturan, monitoring dan evaluasi penggunaan lahan bangunan, dan kegiatan tim terpadu dalam rangka peningkatan PNPB SDA.

Sasaran Kegiatan (SK) 2 – Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Prigi Meningkat

Indikator Kinerja (IK) pada SK 2 yaitu Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Indikator Kinerja (IK) 2 – Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Prigi

Volume produksi perikanan tangkap merupakan jumlah produksi perikanan tangkap yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Pengumpulan data produksi dilakukan oleh petugas Enumerator. Pendataan dilaksanakan dengan pencacahan lengkap menggunakan *form monitoring* data produksi harian. Data yang telah terkumpul kemudian diolah, diverifikasi, dan divalidasi serta dilaporkan secara berkala.

Tabel 5. Capaian IK “Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Prigi” Triwulan III 2024

SK 2		Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi								
IK 2		Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)								
Realisasi Tahun 2019 – 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi		
TW III 2019	TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra	
15.000	18.993,44	12.328,48	10.896,60	15.406,74	14.317,20	17.355,19	121,22%	23.638	73,42%	

Capaian Indikator Kinerja “Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Prigi” (IK 2) pada triwulan III 2024 yaitu sebesar 17.355,19 Ton atau 121,22% dari target triwulan III 2024. Volume produksi per bulan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

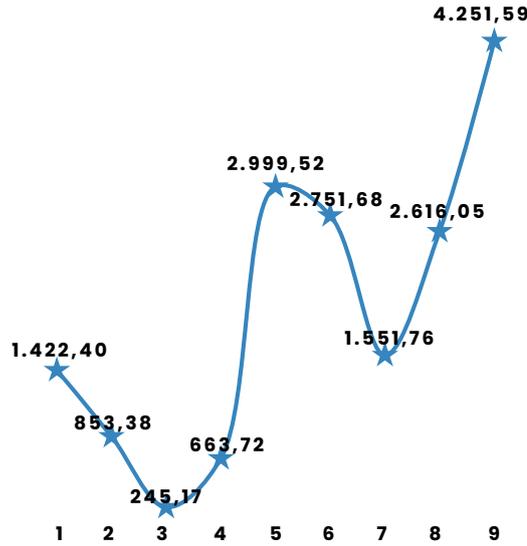
Tabel 6. Volume Produksi Perikanan per Bulan per Alat Tangkap di PPN Prigi Triwulan III 2024

No	Bulan	Volume Produksi per Alat Tangkap (Kg)						Volume Produksi (Kg)
		Purse Seine 1 Kapal	Purse Seine 2 Kapal	Jaring Insang	Payang	Pancing Tonda	Pancing Ulur	
1	Januari	14.919	1.318.733	10.374	27.613	36.439	14.321	1.422.399
2	Februari	62.458	625.294	9.991	24.678	84.044	46.917	853.382
3	Maret	16.020	126.435	3.518	14.356	52.937	31.903	245.169
4	April	54.763	534.293	2.366	516	61.437	10.343	663.718
5	Mei	66.006	2.107.552	-	761.543	61.335	3.080	2.999.516
6	Juni	58.058	1.963.445	-	639.206	64.708	26.264	2.751.681
7	Juli	67.547	968.308	992	405.945	99.485	9.486	1.551.763
8	Agustus	56.551	2.114.409	908	325.624	115.478	3.083	2.616.053
9	September	7.940	3.881.162	1.513	165.549	165.549	145.374	4.251.508
Jumlah		404.262	13.639.631	29.662	2.365.030	625.833	290.771	17.355.189



Alat tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi terdiri dari Pukat Cincin Pelagis Kecil 1 Kapal (*Purse Seine One Boat*), Pukat Cincin Pelagis Kecil 2 Kapal (*Purse Seine Two Boats*), Jaring Insang (*Gill Nets*), Payang (*Pelagic Danish Seine*), Pancing Tonda (*Trawl Lines*), dan Pancing Ulur (*Handline*). Berdasarkan jenis alat tangkapnya, volume produksi terbanyak pada kapal dengan alat tangkap *Purse Seine Two Boats* dengan total volume sebanyak 13.639,63 Ton atau 78,59% dari total volume produksi tahun 2024. Jenis ikan dominan yang tertangkap yaitu Slengseng 22,79%, Lemuru 19,47%, dan Tongkol Lisong 14,9%.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2024, capaian volume produksi sampai bulan September tahun 2024 sebesar 92,20%. Pada triwulan III 2024 sudah memasuki musim ikan, ditandai dengan peningkatan volume produksi yang cukup signifikan di bulan September 2024. Sedangkan volume terendah terjadi pada bulan Juli. Perubahan volume produksi per bulan yang terjadi sebanding dengan frekuensi kunjungan kapal (*effort* yang dilakukan). Pada bulan September frekuensi kunjungan kapal sebanyak 1.585 kali dengan persentase *successed trip* sebesar 72,28%.



Gambar 5. Volume Produksi Perikanan Tangkap Triwulan III 2024

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian triwulan III 2024 cenderung meningkat, dengan persentase peningkatan sebesar 1.948,45 - 6.458,59 Ton atau 12,65% - 59,27%. Namun, jika dibandingkan dengan capaian triwulan III 2020, capaian triwulan III 2024 mengalami penurunan sebesar 1.638,25 Ton atau 8,63%. Hal ini sebanding dengan penurunan frekuensi kunjungan kapal atau usaha (*effort*) yang dilakukan sebanyak 7.415 kali atau 38,94%.



Gambar 6. Perbandingan Volume Produksi Perikanan Tangkap 2019-2024

Jika dibandingkan dengan target Renstra (23.638 Ton), capaian volume produksi triwulan III 2024 sebesar 65,15%. Persentase capaian ini sesuai dengan target, mengingat musim puncak ikan beberapa tahun terakhir terjadi pada bulan Agustus - November.

Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian PPN Prigi sebesar 184,70 % lebih tinggi 7.958,92 ton. Hal ini sebanding dengan frekuensi kunjungan kapal di PPN Prigi yang lebih tinggi dibandingkan dengan PPN Palabuhanratu.





Peningkatan volume produksi perikanan tangkap triwulan III tahun 2024 didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

- Pada TW III mulai memasuki musim penangkapan ikan;
- Kondisi cuaca mendukung untuk melaksanakan kegiatan penangkapan ikan;
- Peningkatan frekuensi kunjungan kapal sebesar 267 kali atau 6,4%;
- Peningkatan *sucessed trip* sebanyak 510 kali atau 18,18%;
- Peningkatan volume produksi hasil tangkapan dengan alat tangkap dominan (*Purse Seine Two Boats*) sebesar 2.311,8 Ton atau 48,32%;

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pendataan volume produksi perikanan tangkap yaitu pendaratan ikan di PPN Prigi berlangsung selama 24 (dua puluh empat) jam dan proses pendaratan tidak hanya fokus pada satu titik saja dengan jumlah enumerator terbatas sehingga mengakibatkan adanya kemungkinan terjadi data *loosing*.

Upaya yang akan dilaksanakan antara lain melaksanakan kegiatan koordinasi dengan pemilik kapal dan pelaku usaha terkait penertiban titik pembongkaran ikan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Anggaran untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini sebesar Rp 10.000.000,00. Sampai dengan triwulan III, realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 9.708.500,00 atau 97,09%. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran akan dihitung pada akhir tahun anggaran.

Dalam pencapaian IK 2, didukung oleh 14 (empat belas) orang SDM yang terdiri dari 9 (sembilan) orang enumerator, 3 (tiga) orang pengolah data, dan 2 (dua) orang validator. Penggunaan *excel* terformat yang terintegrasi dengan *dashboard* Operasional Pelabuhan PPN Prigi mendukung efisiensi dan efektifitas SDM dan waktu dalam pengolahan data produksi perikanan tangkap.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian IK 2 yaitu program layanan data dan informasi dengan kegiatan penyelenggaraan, pengolahan, dan validasi data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Upaya yang telah dilaksanakan pada triwulan III tahun 2024 antara lain validasi data internal terkait kesesuaian hasil tangkapan dengan alat tangkap yang digunakan, serta pengolahan dan validasi data statistik perikanan tangkap.

Sasaran Kegiatan (SK) 3 - Pengelolaan PPN Prigi Berdaya Saing

Indikator Kinerja (IK) pada SK 3 yaitu Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; dan Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.



Indikator Kinerja (IK) 3 - Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di PPN Prigi

Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi dihitung berdasarkan jumlah usulan pengusahaan baru/perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi dibandingkan dengan total jumlah usulan pengusahaan yang masuk di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan, tetapi tetap dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui capaian dsampai dengan triwulan berjalan. Sampai dengan triwulan III tahun 2024, seluruh usulan pengusahaan yang masuk telah dievaluasi dan/atau dianalisa sebanyak 63 (enam puluh tiga) usulan atau 100%, yang terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) usulan pengusahaan perpanjangan dan 6 (enam) usulan pengusahaan baru.

Faktor pendukung pencapaian target persentase permohonan yang dianalisa /dievaluasi yaitu terpenuhinya kelengkapan dan kesesuaian berkas yang disampaikan oleh pemohon.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian target ini yaitu banyaknya pemenuhan berkas permohonan yang perlu diserahkan oleh calon pengguna, sehingga memerlukan proses dan waktu yang lebih lama untuk bisa dianalisa/dievaluasi (usulan pengusahaan baru) dan kepatuhan terhadap kontrak perjanjian kerja sebelumnya (usulan pengusahaan perpanjangan).

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan yaitu melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada calon pengguna; melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada pengguna jasa (pengguna tanah/bangunan).

Sedangkan upaya yang telah dilaksanakan antara lain pemaparan calon pengguna tanah di kawasan PPN Prigi; Monitoring dan evaluasi pemanfaatan penggunaan lahan; Monitoring dan evaluasi penggunaan tanah dan bangunan di kawasan PPN Prigi; serta Penandatanganan kontrak penggunaan bangunan di PPN Prigi.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran akan dihitung pada akhir tahun.

Pencapaian IK 3 didukung oleh anggaran sebesar Rp 85.240.000,00 dan sampai dengan triwulan III 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 51.749.492,00 atau 60,71%. Dalam pencapaian IK 3, didukung oleh 3 (tiga) orang SDM yang terdiri dari 1 (satu) orang P3T dan 2 (dua) orang Pengelola Pengadministrasi Sarana dan Prasarana. Dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengusahaan (penggunaan tanah dan bangunan), menggunakan aplikasi SIPAUS (Aplikasi Pengusahaan) yang berfungsi sebagai digitalisasi arsip terkait penggunaan tanah bangunan, sehingga memudahkan dalam penyimpanan dan pencarian data penggunaan tanah dan bangunan.





Indikator Kinerja (IK) 4 - Tingkat Kinerja PPN Prigi

Tingkat kinerja pelabuhan perikanan merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan sesuai SK Ditjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan.

Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) Administrasi dan sistem informasi; 2) Fasilitas pelabuhan perikanan; 3) Pelayanan umum; serta 4) Investasi dan industri.

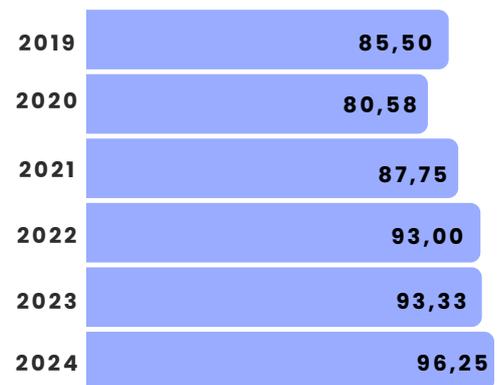
Tabel 7. Capaian IK "Nilai Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan III 2024

SK 3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Berdaya Saing										
IK 4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)										
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi		
TW III 2019	TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra	
85,50	80,58	87,75	93,00	93,33	84	96,25	114,58%	84	114,58%	

Nilai tingkat kinerja triwulan III (Juli-September) memiliki kategori "Sangat Baik" dengan kisaran nilai 95,00 - 97,50. Rata-rata nilai tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi pada triwulan III 2024 yaitu 96,25 atau 114,58%. Rata-rata capaian nilai tingkat kinerja pada triwulan III meningkat sebesar 2,12% dibandingkan dengan triwulan II 2024. Peningkatan ini didukung oleh adanya peningkatan pada beberapa kriteria penilaian antara lain Volume Produksi dan Penyedia Perbekalan.

Pada gambar disamping dapat dilihat perbandingan capaian nilai tingkat kinerja triwulan III tahun 2019 - 2024. Jika dibandingkan dengan capaian 5 (lima) tahun sebelumnya, capaian triwulan III 2024 merupakan capaian tertinggi. Peningkatan nilai tingkat kinerja antara 2,92 - 15,67 atau 3,03% - 19,45%. Berdasarkan hasil analisa, terjadi peningkatan pada beberapa kriteria, antara lain frekuensi *entry*, publikasi, penyaluran perbekalan kapal (BBM, air, dan es), usaha pengolahan di WKOPP, dan jumlah investor. Peningkatan nilai ini merupakan *output* dari tindak lanjut monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala (bulanan) per kriteria penilaian.

Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian nilai tingkat kinerja triwulan III 2024 sebesar 114,58%.



Gambar 7. Perbandingan Nilai Evaluasi Kinerja Tahun 2019 - 2024





Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian nilai tingkat kinerja PPN Prigi sebesar 106,46% dimana capaian nilai tingkat kinerja PPN Palabuhanratu 90,41. Salah satu faktor yang paling berpengaruh yaitu volume produksi perikanan tangkap di PPN Prigi lebih tinggi.

Faktor pendukung pencapaian target tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yaitu :

- Adanya kontribusi dan komitmen dari setiap kelompok kerja yang melakukan tugasnya serta melaporkan dan mengumpulkan data dukung pelaksanaan kegiatan;
- Keaktifan operator PIPP dalam melaksanakan input data, baik harian maupun bulanan;
- Adanya monitoring dan evaluasi serta validasi dan supervisi secara berkala terhadap input data yang telah dilaksanakan;
- Adanya tindak lanjut monitoring evaluasi dan supervisi pelaksanaan input data PIPP

Sedangkan faktor penghambat pencapaian target ini yaitu :

- Tingkat ketelitian operator dalam penginputan data perlu ditingkatkan (*human error*);
- Nilai tingkat kinerja bersifat fluktuatif yang sangat dipengaruhi oleh 27 (dua puluh tujuh) parameter penilaian;
- Jaringan internet kurang stabil;
- Belum adanya *updating* data kapal aktif sehingga terdapat beberapa kapal yang tidak ditemukan pada saat input data kapal;
- Penginputan data PIPP hanya dapat dilakukan melalui PIPP *mobile* membutuhkan sarana serta waktu yang lebih lama. Selain itu, terdapat menu verifikasi yang sangat mempengaruhi pada capaian kriteria produksi, frekuensi kunjungan kapal, daya tampung kolam, dan penyerapan tenaga kerja.

Upaya yang telah dan akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu :

- Menyusun jadwal entry PIPP;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan input data PIPP dan capaian tingkat kinerja bulanan;
- Menginput data kapal izin daerah secara bertahap berdasarkan kapal aktif

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM).

Pencapaian IK 4 didukung oleh anggaran sebesar Rp 148.609.000,00 dan sampai dengan akhir triwulan III 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 86.004.445,00 atau 57,87%. Dalam pencapaian IK 4, didukung oleh 12 (dua belas) orang operator Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan. Penggunaan *dashboard* Operasional Pelabuhan PPN Prigi mendukung efisiensi waktu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *entry* PIPP.





Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kinerja Pelabuhan yaitu : Program Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Perintis yang Dikelola dan Operasional sesuai Standar, melalui kegiatan pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di Pelabuhan Perikanan dan PP Binaan; dll.

Indikator Kinerja (IK) 5 - Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran

Tingkat pelayanan kesyahbandaran merupakan indikator yang menunjukkan pelayanan kesyahbandaran yang dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen yaitu :

Tingkat pelayanan kesyahbandaran merupakan indikator yang menunjukkan pelayanan kesyahbandaran yang dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen yaitu :

- Jumlah persetujuan yang diterbitkan (bobot 40%)
Dihitung berdasarkan jumlah kapal yang diterbitkan persetujuan berlayarnya dibagi dengan jumlah kapal aktif.
- Jumlah Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%)
Dihitung berdasarkan kapal yang diterbitkan STBLK dibandingkan jumlah kapal aktif.
- Jumlah Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%)
Formula penghitungan = $(100 - (\text{jumlah permintaan verifikasi SHTI yang diterbitkan} : \text{jumlah SHTI yang diterbitkan}) \times 100\%$.

Indikator Kinerja ini bersifat tahunan, sehingga belum dapat dilakukan pengukuran capaian dan belum dapat membandingkan dengan target tahunan, capaian tahun sebelumnya, target Renstra, dan capaian Satker lain.

Pencapaian IK 5 didukung oleh anggaran sebesar Rp 407.772.000,00 dan sampai dengan triwulan III 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 244.337.078,00 atau 59,92%. Dalam pencapaian IK 5, didukung oleh 12 (dua belas) orang SDM, yang terdiri dari 1 (satu) orang Syahbandar, 8 (delapan) orang petugas penerbitan SPB dan STBLK, serta 3 (tiga) orang petugas penerbitan SHTI. Dalam pelaksanaan penerbitan SHTI, PPN Prigi memiliki inovasi "KIRIM SHTI" untuk peningkatan efektifitas waktu, biaya, dan tenaga dalam pengajuan SHTI, dimana pengguna jasa tidak perlu datang ke PPN Prigi. Permohonan penerbitan SHTI dikirimkan melalui *email* dan produk SHTI dikirim melalui jasa pengiriman dengan biaya pengiriman dibayar pemohon (COD).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran yaitu : Program pengelolaan pelabuhan perikanan, melalui kegiatan pelaksanaan tata kelola dan operasional kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, desiminasi regulasi kesyahbandaran dan aplikasi teman SPB di Pelabuhan Perikanan, pengelolaan dan operasional SHTI, desiminasi SHTI penerapan Lembar Awal di Pelabuhan Perikanan, dll.

Sasaran Kegiatan (SK) 4 – Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Prigi yang Optimal

Indikator Kinerja (IK) pada SK 4 yaitu Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dan Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Indikator Kinerja (IK) 6 – Persentase Pengendalian Fasilitas di PPN Prigi

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya. Indikator kinerja “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Prigi” dihitung berdasarkan persentase pengembangan fasilitas dibandingkan dengan *masterplan / draft* perubahan masterplan.

Indikator Kinerja ini bersifat tahunan, sehingga belum dapat dilakukan pengukuran capaian dan belum dapat membandingkan dengan target tahunan, capaian tahun sebelumnya, target Renstra, dan capaian Satker lain.

Pencapaian IK 6 didukung oleh anggaran sebesar Rp 600.748.000,00 dan sampai dengan triwulan III 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 336.071.491,00 atau 55,94%. Dalam pencapaian IK 5, didukung oleh 4 (orang belas) orang SDM, yang terdiri dari 3 (tiga orang) Pengadministrasi Sarana dan 1 (satu) orang AP3T.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Persentase Pengendalian Fasilitas PPN Prigi yaitu : Program prasarana bidang kemaritiman, kelautan, dan perikanan melalui kegiatan melalui kegiatan pelaksanaan pembangunan / pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di PP Printis untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur.

Indikator Kinerja (IK) 7 – Nilai Pengendalian Lingkungan PPN Prigi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang mengoperasikan pelabuhan perikanan harus 1) bertanggungjawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan.



Penilaian pengendalian lingkungan pelabuhan perikanan berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN). SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang diperbarui berkala dan dicantumkan dalam bentuk skore pelabuhan. Indikator hasil meliputi kebersihan pelabuhan, kualitas udara, kualitas air, penggunaan listrik, penggunaan air, pengelolaan limbah B3, dan kepatuhan regulasi.

Tabel 8. Capaian IK “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Triwulan III 2024

SK 4 Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal									
IK 7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi	
TW III 2019	TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	6,1	30,10	93,29	309,92%	30,01	310,86%

Capaian IK 7 triwulan Ili 2024 sebesar 93,29 atau 309,92% dari target triwulan III 2024. Capaian nilai pengendalian lingkungan PPN Prigi memiliki predikat “Sangat Baik”, hal ini disebabkan seluruh indikator program *mandatory* dan program *voluntary* tata kelola pengendalian lingkungan terpenuhi dan terlaksana dengan baik.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian triwulan III 2024 meningkat cukup signifikan. Hal ini disebabkan, pada triwulan III 2023, pengelolaan SELARASKAN belum dilaksanakan dengan optimal. Nilai Pengendalian Lingkungan merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2019-2022.

Jika dibandingkan dengan target Renstra (Reviu kedua 2023), capaian sebesar 310,86%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian PPN Prigi sebesar 100,09% dimana nilai SELARASKAN PPN Palabuhanratu sebesar 90,49.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja nilai pengendalian lingkungan di triwulan III yaitu data dukung yang dibutuhkan dalam pelaporan setiap program *mandatory* dan *voluntary* di SELARASKAN sudah terpenuhi sesuai dengan periode pelaksanaan masing-masing program. Sedangkan faktor penghambat/ kendala yang dihadapi dalam pencapaian IK ini yaitu pengelolaan sampah kurang maksimal.

Berdasarkan faktor penghambat/ kendala yang dihadapi, upaya yang akan dilaksanakan mengoptimalkan pengelolaan sampah dengan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya serta melakukan kegiatan pembuatan pupuk dari sampah organik.





Sedangkan upaya yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan III 2024 yaitu pelaksanaan kegiatan K5, pemantauan pengelolaan lingkungan, melaksanakan monitoring dan evaluasi tim pengendalian lingkungan, serta *surveillance* ISO 14001.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Pencapaian IK 7 didukung oleh anggaran sebesar Rp 231.116.000,00 sampai dengan triwulan III 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 209.362.001,00 atau 90,59%. Selain itu, pencapaian IK 7 didukung oleh 8 (delapan) orang SDM berdasarkan Surat Tugas Tim Pengelola Aplikasi Selaraskan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran akan dihitung pada akhir tahun anggaran.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Nilai Pengendalian Lingkungan yaitu : Program pelabuhan perikanan - pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan melalui kegiatan K5 di pelabuhan perikanan, gerakan cinta laut dalam rangka mendukung pengendalian lingkungan, pemantauan pengelolaan lingkungan, dan *surveillance* ISO 14001.

Sasaran Kegiatan (SK) 5 – Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Prigi

Indikator Kinerja (IK) pada SK 5 yaitu Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan.

Indikator Kinerja (IK) 8 – Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

Indikator kinerja “Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan” merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Tabel 9. Capaian IK “Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan III 2024

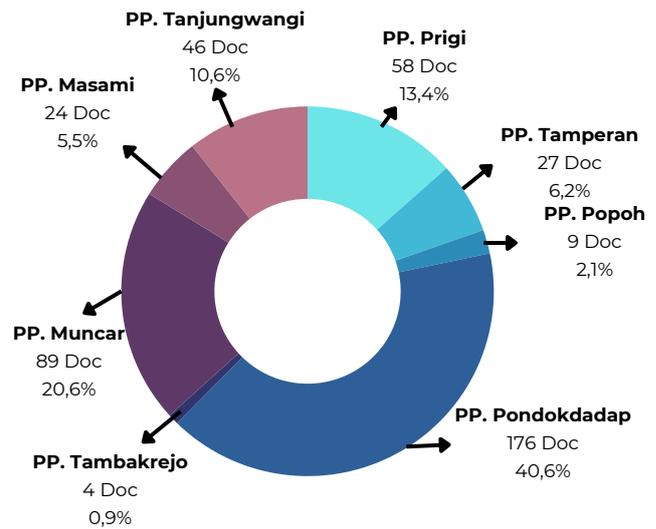
SK 5 Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Prigi									
IK 8 Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)									
Realisasi Tahun 2019 – 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi	
TW III 2019	TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	308	367	433	117,98%	50	866

Capaian IK 8 triwulan III tahun 2024 sebanyak 433 dokumen dari target 367 dokumen atau 117,98% dari target yang ditentukan. Capaian indikator kinerja Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan pada triwulan III 2024 merupakan akumulasi dari capaian tahun 2023 dan capaian sampai dengan triwulan III 2024.





PPN Prigi melayani penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) di pelabuhan binaan (UPT PPP Tamperan, UPT PPP Popoh, IPPP Tambakrejo, UPT PPP Pondokdadap, UPT PPP Muncar, dan Pelabuhan Masami/ Tanjungwangi). Penerbitan SKKP pada tahun 2023 dilakukan melalui mekanisme Reguler sebanyak 29,67% (100 dokumen) dan SE (Surat Edaran) sebanyak 70,33% (237 dokumen). Sedangkan sampai dengan triwulan III 2024, penerbitan SKKP melalui mekanisme reguler sebanyak 86 (delapan puluh enam) dokumen.



Gambar 8. Penerbitan SKKP per Pelabuhan Perikanan s.d. Triwulan III 2024

Jika dibandingkan dengan capaian triwulan III tahun sebelumnya, capaian triwulan III 2024 sebesar 31,17%. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan mekanisme penerbitan SKKP yang pada tahun 2023 mekanisme surat edaran dan reguler, Sedangkan pada tahun 2024, hanya menggunakan mekanisme reguler.

Jika dibandingkan dengan target Renstra (Reviu kedua 2023), capaian triwulan III 2024 sebesar 866%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian PPN Prigi sebesar 267,28%, dimana capaian IK 8 PPN Palabuhanratu 162 (seratus enam puluh dua) dokumen.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu Syahbadar di beberapa UPTD binaan telah mengikuti diklat petugas kelaikan sehingga bisa pemeriksaan kelaikan menjadi lebih cepat.

Sedangkan faktor penghambat / kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu Kurangnya anggaran menyebabkan mobilisasi dalam rangka pemeriksaan kelaikan di UPTD binaan menjadi terbatas.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu melaksanakan pembinaan / sosialisasi secara perorangan kepada pemilik kapal dengan tujuan mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman pemilik kapal terkait komponen kelaikan kapal perikanan.

Sedangkan upaya yang telah dilaksanakan yaitu melaksanakan kegiatan pemeriksaan kelaikan kapal, serta melaksanakan sosialisasi secara perorangan kelaikan kapal perikanan kepada pemilik kapal perikanan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Anggaran untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini sebesar Rp 25.000.000 dan sampai dengan triwulan





III 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 17.441.000,00 atau 69,76%. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran akan dilakukan pengukuran pada akhir tahun anggaran. Dalam pencapaian IK 8, didukung oleh 9 (sembilan) orang SDM yang terdiri atas 7 (tujuh) orang petugas kelaikan kapal, 1 (satu) orang verifikator, dan Kepala Pelabuhan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran yaitu : yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan – pengelolaan pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan pengawakan kapal perikanan dengan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan kelaikan/ pengukuran kapal perikanan.

Sasaran Kegiatan (SK) 6 - Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi / Terlindungi di PPN Prigi

Indikator Kinerja (IK) pada SK 6 yaitu Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 9 - Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan

Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi kompetensi laik laut, laik tangkap, dan laik simpan, serta memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan.

Penghitungan IK 9 yaitu persentase jumlah awak kapal / nelayan yang memiliki e-PKL / PKL dan sudah tersertifikasi dibandingkan dengan jumlah awak kapal yang memiliki e-PKL / PKL dan sudah tersertifikasi.

Indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga belum dapat dilakukan pengukuran capaian kinerja dan belum dapat membandingkan capaian dengan capaian tahun sebelumnya, target Renstra, dan capaian Satker lain.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu adanya sosialisasi dan fasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL) serta adanya kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya pemberian jaminan keselamatan kerja bagi nelayan.

Faktor penghambat / kendala pencapaian indikator kinerja ini yaitu awak kapal perikanan belum memiliki sertifikasi awak kapal sesuai jabatan, belum terlaksananya Perjanjian Kerja Laut (PKL) pada seluruh awak kapal, awak kapal tidak memiliki kartu tanda pengenal (KTP), Nomor Induk Kependudukan tidak valid, batas usia kepemilikan jaminan sosial Asuransi dan BPJS Ketenagakerjaan, serta kurangnya kesadaran awak kapal untuk memiliki PKL dan SKN, serta adanya keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan SKN.



Pada tanggal 8-9 Agustus 2024 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Awak Kapal Perikanan / Nelayan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) dengan jumlah peserta sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang. Tujuan pelaksanaan Bimtek Kecakapan Nelayan (SKN) yaitu meningkatkan pengetahuan tentang dasar pelayaran dan operasi penangkapan ikan, serta keselamatan kerja dan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Selain itu, upaya yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan III 2024 yaitu 1) Sosialisasi dan fasilitasi Perjanjian Kerja Lat (PKL); 2) adanya kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya pemberian jaminan keselamatan kerja bagi nelayan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini sebesar Rp 13.000.000. Sampai dengan triwulan III 2024, serapan anggaran sebesar Rp 13.000.000,00 atau 100%. Dalam pencapaian IK 9, didukung oleh 7 (tujuh) orang SDM yang terdiri dari 1 (orang) orang syahbandar, 3 (tiga) orang Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, dan 3 (tiga) orang petugas kesyahbandaran.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Kapal Perikanan yaitu : yaitu program fasilitasi dan pembinaan masyarakat - nelayan / awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan / kompetensinya di bidang sarana penanganan ikan melalui kegiatan Sertifikasi Kecakapan Nelayan.

Sasaran Kegiatan (SK) 7 – Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Prigi

Indikator Kinerja pada SK 7 yaitu :

- Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indikator Kinerja (IK) 10 – Nilai PM Pembangunan ZI PPN Prigi

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Indikator kinerja ini merupakan penilaian pembangunan ZI menuju WBK yang mencakup 6 (enam) area pengungkit dan 2 (dua) area komponen hasil yang mengacu kepada Juknis Pengasawan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Indikator kinerja ini bersifat tahunan, sampai dengan triwulan II 2024 belum dilakukan penilaian pembangunan ZI. Sehingga perbandingan capaian dengan target 2024, capaian tahun sebelumnya, target Renstra, dan capaian Satker lain belum dapat dilakukan.

Faktor pendukung dalam pencapaian target indikator kinerja ini adalah :

- Ketertiban anggota dalam menyusun dokumen kelengkapan pembangunan ZI
- Adanya monitoring dan evaluasi secara rutin
- Adanya pendampingan oleh Inspektorat V KKP dalam pembangunan ZI

Secara umum, tidak ada kendala dalam pemenuhan indikator kinerja ini.

Upaya yang telah dilaksanakan yaitu melaksanakan koordinasi dengan Inspektorat JV dan Satker lain terkait dokumen rencana kerja, melengkapi dokumen pembangunan ZI WBK, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen WBK.

Anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini sebesar Rp 22.546.000,00 Sampai dengan triwulan III 2024, serapan anggaran sebesar Rp 22.000.000,00 atau 97,58%. Dalam pencapaian IK 10, didukung oleh 42 (empat puluh dua) orang SDM berdasarkan Surat Tugas B.45/PPN.PRG/KP.440/I/2024 tentang Tim Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Lingkup PPN Prigi Tahun 2024. Dokumen ZI WBK dikumpulkan melalui *google drive*, sehingga lebih memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelengkapan dokumen serta memudahkan koordinasi tim.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran yaitu : yaitu program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP melalui kegiatan Pemantauan dan Pembangunan Zona Integritas.

Indikator Kinerja (IK) 11 – Persentase Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada audit, revidi, dan evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada triwulan IV 2023 s.d. triwulan III tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Formula penghitungan yaitu persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang diberikan.

Tabel 10. Capaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Triwulan III 2024

SK 7 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
IK 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)									
Realisasi Tahun 2019 – 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi	
TW III 2019	TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	100	80	100	125%	75	133,33%

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi pada triwulan III 2024 yaitu 100% (seluruh temuan dan rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti) atau 125% dari target yang ditentukan. Rekapitulasi hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal pada triwulan II 2024 yang telah ditindaklanjuti pada triwulan III 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 11. Rekapitulasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Triwulan III 2024

Pengawasan	Nomor LHP	Laporan Hasil Pengawasan	Sebelum Tindak Lanjut			Tindak Lanjut			Ket
			Temuan	Rekom	Nilai Keuangan	Temuan	Rekom	Nilai Keuangan	
Revidi	101/ITJ.2/HP.380/V/2024	Laporan Hasil Revidi atas Usulan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan Cara Pemusnahan pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi, di Provinsi DKI Jakarta	1	1	-	1	1	-	Tuntas

Pada triwulan II 2024, dilakukan 2 (dua) kegiatan pengawasan berupa kegiatan Revidi Laporan Hasil Revidi atas Usulan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan Cara Pemusnahan dengan hasil pengawasan 1 (satu) temuan dan 1 (satu) rekomendasi. Seluruh hasil pengawasan (temuan dan rekomendasi) yang diberikan telah ditindaklanjuti (tuntas).



Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian triwulan III 2024 memiliki nilai yang sama. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra (Reviu kedua 2023), capaian IK 11 sebesar 133,33%.

Faktor pendukung capaian kinerja ini yaitu adanya tindak lanjut temuan dan/atau saran pada laporan hasil pengawasan secara tepat waktu serta koordinasi dengan Itjen terkait penyelesaian permasalahan. Secara umum, tidak terdapat penghambat dalam pencapaian Indikator Kinerja ini.

Upaya yang telah dan akan dilaksanakan yaitu melakukan koordinasi terus menerus kepada Inspektorat Jenderal KKP dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Pencapaian IK 11 didukung oleh anggaran sebesar Rp 11.400.000,00 dan sampai dengan triwulan III 2024, serapan anggaran sebesar Rp 6.399.480,00 atau 56,14%. Kegiatan koordinasi dan konsultasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dilakukan secara *online* dan pemenuhan dokumen diunggah pada *google drive* sehingga lebih efektif dan efisien, baik dari segi sumber daya manusia maupun waktu penyelesaiannya.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program dukungan manajemen internal – layanan manajemen kinerja internal melalui kegiatan :

- Penyusunan PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan)
- Penyusunan manajemen resiko dan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
- Penyelesaian dan evaluasi tindak lanjut LHA (Laporan Hasil Evaluasi)

Indikator Kinerja (IK) 12 - Nilai Rekonsiliasi Kinerja PPN Prigi

Rekonsiliasi kinerja merupakan proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja KKP, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap eselon II DJPT untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Terdapat 4 aspek penilaian diantaranya adalah aspek kepatuhan (bobot 25%), aspek kesesuaian (bobot 25%), aspek ketercapaian (bobot 30%), dan aspek ketepatan (20%).

Indikator kinerja ini bersifat tahunan, sampai dengan triwulan III 2024 belum dilakukan penilaian Rekonsiliasi Kinerja. Sehingga perbandingan capaian dengan target 2024, capaian tahun sebelumnya, target Renstra, dan capaian Satker lain belum dapat dilakukan.



Keberhasilan dan kegagalan indikator kinerja ini ditentukan oleh kualitas dan pemanfaatan informasi kinerja pada unit kerja, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran melalui E-SAKIP yang terintegrasi, dan kualitas monev kinerja serta pemanfaatan hasil monev kinerja sebagai umpan balik perbaikan/peningkatan akuntabilitas kinerja. Secara umum, tidak ada kendala dalam penemuan target indikator kinerja ini.

Upaya yang telah dan akan dilaksanakan yaitu meningkatkan pemanfaatan informasi kinerja pada unit kerja dalam pengelolaan kinerja dan penganggaran sebagai dasar pemberian *reward and punishment*, peningkatan kualitas monev Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai, evaluasi program dan evaluasi akuntabilitas kinerja dan memanfaatkan secara optimal hasil monev untuk umpan balik perbaikan peningkatan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pelaksanaan program.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini sebesar Rp 55.000.000,00 dan sampai dengan triwulan III 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 33.733.360,00 atau 61,33%. Berdasarkan Surat Tugas No.196/PPN.PRG/KP.440/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 tentang Tim Pengelola Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, SDM yang menangani pengelolaan kinerja sebanyak 10 (sepuluh) orang. Untuk memudahkan kegiatan pengumpulan dan pengukuran dan pelaporan kinerja, pengumpulan data capaian dan analisisnya dilakukan menggunakan *google spreadsheet* yang terintegrasi dengan *dashboard* Capaian Kinerja PPN Prigi (Si Cakep) yang mendukung efektifitas dan efisiensi dalam pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Sedangkan pemenuhan dokumen diunggah pada *google drive*, sehingga lebih efektif dan efisien, baik dari segi sumber daya manusia maupun waktu penyelesaiannya.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program dukungan manajemen internal – layanan manajemen kinerja internal melalui kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap.

Indikator Kinerja (IK) 12 – Indeks Profesionalitas ASN PPN Prigi

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya (Permen PAN dan RB No.38 Tahun 2018).

Terdapat penyesuaian / perubahan cara perhitungan IP ASN sesuai dengan surat BKN 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 15 September 2023 tentang pengukuran IP-ASN. Perubahan formula perhitungan sebagai berikut :

- Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki.
- Diklat 20 JP dihitung secara proporsional;

- Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja
- Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir

Pada tahun 2024, jumlah jenis pelatihan dan media yang diikuti pegawai dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi lebih bervariasi, baik secara luring maupun daring (*emilea, zoom meetings, dan youtube*). Selain itu, instansi penyelenggara kegiatan pelatihan pegawai, selain dari internal KKP juga diselenggarakan oleh BPSDM Jatim, BKD Kediri, BKN, Korp Pegawai Negeri Sipil dan instansi pembina masing-masing JFT seperti Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian, ANRI, dll. Capaian indikator kinerja IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi triwulan III sebesar 89,95.

Pengukuran indikator kinerja ini bersifat semester, sehingga pada triwulan III belum dilakukan pengukuran. Sehingga perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya, perbandingan dengan capaian Satker lain, dan perbandingan dengan target Renstra belum dapat dilakukan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, capaian indikator kinerja IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi triwulan III sebesar 89,95. Kendala yang dihadapi yaitu masih ada pegawai yang memiliki IP ASN rendah dan sedang. Sehingga, upaya yang akan dilaksanakan yaitu melakukan dialog kinerja dan monitoring evaluasi secara berkala.

upaya yang telah dilaksanakan pada triwulan III 2024 antara lain :

- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap peningkatan kompetensi pegawai.
- Memberikan analisa berupa rekomendasi dan upaya peningkatan capaian IP ASN untuk masing - masing pegawai;
- Melaporkan anomali dan melakukan pemantauan terkait perbaikannya;
- Meningkatkan capaian IP ASN pegawai dengan kategori Rendah dan Sedang

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Pencapaian IK 13 didukung oleh anggaran sebesar Rp 8.086.338.000,00 dan sampai dengan triwulan III 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 6.842.083.581,00 atau 84,61%. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran akan dihitung pada akhir tahun anggaran. Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh 53 (lima puluh tiga) orang ASN. Selain itu, didukung oleh 2 (dua) orang Analis Kepegawaian yang bertugas melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan, monitoring dan evaluasi, serta input data capaian pengembangan kompetensi pada aplikasi e-pegawai.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program dukungan manajemen internal – layanan perkantoran dan layanan manajemen SDM internal, meliputi kegiatan : pembayaran gaji dan tunjangan; pembinaan dan pengembangan SDM, penguatan integritas dan substansi teknis bagi PNS Pengangkatan Tahun 2023, dan peningkatan kompetensi pegawai.

Indikator Kinerja (IK) 14 - Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa PPN Prigi

Tingkat kepatuhan pengadaan barang / jasa merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

- Rencana umum pengadaan telah diupload dapal aplikasi SIRUP (20%)
- Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
- Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%)
- Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Indikator kinerja ini bersifat tahunan, sampai dengan triwulan III 2024 belum dilakukan penilaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa. Sehingga perbandingan capaian dengan target 2024, capaian tahun sebelumnya, target Renstra, dan capaian Satker lain belum dapat dilakukan.

Faktor pendukung tercapainya IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa yaitu pelaksanaan kegiatan sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan; KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak Surat Perjanjian untuk seluruh paket pengadaan telah tersedia sesuai jadwal. Sedangkan faktor penghambat / kendala pencapaian indikator kinerja ini adalah pengendalian pelaksanaan PBJ yang masih belum maksimal. Berdasarkan hal tersebut, upaya yang akan dilaksanakan antara lain : Menyusun manajemen risiko PBJ dan melakukan pemantauan serta pengendalian secara berkala.

Upaya yang telah dilaksanakan pada triwulan III 2024 yaitu melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, mengelola kontrak penyedia barang/jasa pemerintah, melaksanakan aktivitas pengendalian sesuai dengan manajemen resiko, melaksanakan kegiatan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal yang ditetapkan, dan melakukan proses barang/jasa pemerintah secara e-purchasing.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Pencapaian IK 14 didukung oleh anggaran sebesar Rp 703.461.000,00 dan sampai dengan triwulan III 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 667.486.700,00 atau 94,87%. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran akan dihitung pada akhir tahun anggaran. Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh 1 (satu) orang pejabat fungsional Pengelola Barang/ Jasa.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program dukungan manajemen melalui kegiatan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, operasional perkantoran - pengadaan pakaian dinas, pengadaan peralatan perkantoran dalam rangka mendukung PNBPN, dan layanan prasarana internal.

Indikator Kinerja (IK) 15 – Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Prigi

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut :

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 10%)
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 balik ke penggunaan barang dan pengelolaan barang (bobot 25%)
- Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (reevaluasi aset) (bobot 20%)
- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian (Bobot 25%)
- Penyusunan Laporan BMN (semesteran dan tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%)

Indikator kinerja ini bersifat tahunan, sampai dengan triwulan III 2024 belum dilakukan penilaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN. Sehingga perbandingan capaian dengan target 2024, capaian tahun sebelumnya, target Renstra, dan capaian Satker lain belum dapat dilakukan.

Faktor pendukung pencapaian indikator kinerja ini yaitu adanya optimalisasi kinerja dan evaluasi terhadap BMN lebih baik. Sedangkan faktor penghambat / kendala yang dihadapi yaitu : 1) Dalam pelaksanaan penghapusan masih belum sesuai dengan SOP karena berhubungan dengan instansi eksternal maupun internal; 2) Belum semua BMN yang rusak berat dilakukan penghapusan.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja ini antara lain : 1) Berkoordinasi secara intensif dalam pengelolaan BMN; 2) Mengusulkan penghapusan BMN yang sudah rusak. Sedangkan upaya yang telah dilaksanakan pada triwulan III 2024 antara lain optimalisasi pemanfaatan aset, mengajukan usulan PSP (penetapan status penggunaan), serta penghapusan / pemusnahan aset.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Pencapaian IK 15 didukung oleh anggaran sebesar Rp 4.058.200.000,00 sampai dengan triwulan III 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 2.932.393.325,00 atau 72,44%. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran akan dihitung pada akhir tahun anggaran. Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh 3 (tiga) orang pejabat Pengelola BMN.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program layanan dukungan manajemen internal - operasional dan pemeliharaan kantor melalui kegiatan pemeliharaan alat pengolah data, perawatan kendaraan dinas, langganan daya dan jasa, operasional perkantoran dan pimpinan, pemeliharaan gedung dan bangunan, serta operasional perkantoran.

Indikator Kinerja (IK) 16 – Nilai IKPA PPN Prigi

Nilai IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Capaian Nilai IKPA dilaksanakan berdasarkan 8 (delapan) Indikator Pelaksanaan Anggaran yang dapat diukur dari 3 (tiga) aspek/sisi yaitu :

- I. Kualitas Perencanaan Anggaran (bobot 20%) dengan 2 indikator yaitu
 - Revisi DIPA (bobot 10%)
 - Deviasi Halaman III DIPA (bobot 10%)
- II. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (bobot 55%) dengan 5 indikator yaitu :
 - Penyerapan anggaran (bobot 20%)
 - Belanja Kontraktual (bobot 10%)
 - Penyelesaian tagihan (bobot 10%)
 - Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
 - Dispensasi SPM (bobot 5%)

Pengukuran indikator kinerja ini bersifat semester, sehingga pada triwulan III belum dilakukan pengukuran. Sehingga perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya, perbandingan dengan target Renstra, dan perbandingan dengan capain Satker lain belum dapat dilakukan.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu adanya upaya meningkatkan kualitas perencanaan, meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, serta akselerasi pelaksanaan kegiatan, Selain itu melakukan percepatan Pelaksanaan PBJ, tepat waktu dalam pencapaian data kontrak, percepatan pelaksanaan belanja kontraktual, ketepatan waktu penyampaian UP/TUP, ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja, mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran, dan akselerasi pencapaian output yang berkualitas.

Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu kurangnya konsistensi dan komitmen untuk melakukan realisasi penyerapan sesuai target didalam Halaman III DIPA, kurang presisinya penyerapan anggaran per jenis belanja sesuai dengan target triwulan IKPA dikarenakan kurang memahaminya seluruh pelaksana kegiatan terkait realisasi per jenis belanja.

Upaya yang telah dan akan dilakukan antara lain : Melakukan pemantauan secara berkala capaian realisasi terhadap rencana RPD Halaman III DIPA per jenis belanja; Melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban tepat waktu sehingga dengan cepat proses revolving UP/TUP maupun LS. Selain itu, pada semester I telah dilakukan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Indikator IKPA.



Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Pencapaian IK 16 didukung oleh anggaran sebesar Rp 20.290.000,00 dan sampai dengan triwulan III 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 13.042.500,00 atau 64,28%. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran akan dihitung pada akhir tahun anggaran. Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Pengelola Keuangan, 2 (dua) orang Pranata Keuangan APBN, serta 1(satu) orang Analis Pengelola Keuangan APBN.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program layanan dukungan manajemen keuangan - kegiatan pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap melalui kegiatan laporan keuangan dan BMN.

Indikator Kinerja (IK) 17 - Nilai Kinerja Anggaran PPN Prigi

Kinerja anggaran merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA.

Indikator kinerja ini bersifat tahunan, sampai dengan triwulan III 2024 belum dilakukan pengukuran. Sehingga perbandingan capaian dengan target 2024, capaian tahun sebelumnya, target Renstra, dan capaian Satker lain belum dapat dilakukan.

Faktor pendukung tercapainya IK NKA yaitu dilakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan capaian Indikator Konsistensi, Indikator Efisiensi dan Indikator Nilai Efisiensi. Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu dari 8 (delapan) indikator IKPA masih ada 3 (tiga) indikator yang belum memiliki nilai maksimal.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian NKA pada periode selanjutnya yaitu meningkatkan pelaksanaan 8 (delapan) Indikator IKPA.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Pencapaian IK 17 didukung oleh anggaran sebesar Rp 86.040.000,00 dan sampai dengan triwulan III 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 73.353.792,00 atau 85,26%. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran akan dihitung pada akhir tahun anggaran. Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Pencapaian IK ini didukung oleh 2 (dua) orang Pengelola Keuangan.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program layanan dukungan manajemen keuangan - kegiatan pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, serta pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Indikator Kinerja (IK) 18 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup PPN Prigi

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/ Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/ Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

Tabel 14. Capaian IK "Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan III 2024

SK 7 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi										
IK 18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)										
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi		
TW III 2019	TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra	
82	82	84	86	89,04	88,30	92,84	105,14%	88,21	105,25%	

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan secara periodik. Tujuan pelaksanaan SKM yaitu untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik, dan mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Capaian indikator kinerja SKM triwulan III 2024 yaitu 92,84 dengan kategori "Sangat Baik" atau 105,14% dari target triwulan III 2024 dimana target triwulan III 2024 sebesar 88,30.

Berdasarkan hasil analisa Indeks Kepuasan Masyarakat pada triwulan II 2024, unsur dengan nilai tertinggi yaitu :

- Kemudahan Prosedur
Pelayanan yang dilakukan susah sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP sehingga pengguna jasa mendapatkan pelayanan yang sesuai.
- Persyaratan Pelayanan
Telah dilakukan publikasi dan sosialisasi terkait dengan persyaratan pelayanan yang dilaksanakan.
- Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas
Petugas pelayanan telah mengikuti Diklat / Bimtek untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan Tupoksi, serta telah mengikuti Bimtek Pelayanan Prima.



Sedangkan unsur layanan dengan nilai terendah berdasarkan hasil analisa indeks survey kepuasan masyarakat adalah

- **Kecepatan Respon**
Berdasarkan hasil analisa, unsur kecepatan respon yang mendapatkan nilai paling rendah adalah pelayanan penerbitan Persetujuan Berlayar. Nilai tersebut rendah dimungkinkan karena pengguna jasa menilai respon petugas terhadap ketika melaksanakan pelayan belum maksimal. Petugas perlu mendapatkan pengetahuan terkait dengan bagaimana melaksanakan pelayanan prima.
- **Waktu Penyelesaian**
Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan nilai waktu penyelesaian layanan rendah. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi, antara lain terkait alat kerja, kecepatan internet, kemampuan petugas ataupun pengetahuan *stakeholder* terkait jangka waktu layanan.
- **Layanan Konsultasi**
Layanan konsultasi mendapatkan nilai rendah dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait media layanan pengaduan/konsultasi di PPN Prigi. PPN Prigi mempunyai media konsultasi yaitu SIPARI, namun kurang maksimal dalam pemanfaatannya.

Capaian nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada triwulan III 2024 merupakan nilai tertinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan tren nilai naik / meningkat, dimana peningkatannya berkisar antara 3,8 - 10,84 atau 4,27% - 13,22%. Berdasarkan Gambar disamping, dapat dilihat bahwa nilai SKM dari tahun 2020 s.d. tahun 2024 menunjukkan peningkatan terus-menerus. Hal ini sebanding dengan upaya peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan yang dilakukan PPN Prigi.



Gambar 9. Perbandingan Capaian Nilai SKM PPN Prigi Tahun 2019-2024

Jika dibandingkan dengan target Renstra (Reviu kedua Renstra) capaian nilai SKM Triwulan III sebesar 105,25%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian PPN Prigi lebih rendah yaitu sebesar 98,24% dimana capaian nilai SKM PPN Palabuhanratu sebesar 94,50.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu adanya perbaikan sarana dan prasarana serta perbaikan kualitas pelayanan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus sehingga kepuasan pengguna jasa meningkat.

Sedangkan faktor penghambat / kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu kurangnya pengetahuan pengguna jasa dalam pengisian SKM secara *online*, sehingga masih perlu bantuan pengisian SKM dari petugas. Selain itu, pengetahuan *stakeholder* terkait ketentuan pelayanan dan layanan pengaduan perlu ditingkatkan.





Upaya yang akan dilaksanakan dalam mengatasi kendala / permasalahan yang terjadi antara lain :

- Kecepatan Respon
Melaksanakan kegiatan internalisasi pelayanan prima bagi petugas pelayanan sebagai upaya optimalisasi pelayanan prima kepada *stakeholder*.
- Waktu Penyelesaian
Pelaksanaan sosialisasi / publikasi terkait ketentuan pelayanan, termasuk waktu penyelesaian masing-masing pelayanan.
- Layanan Konsultasi
Rencana Layanan Konsultasi melalui kecepatan Respon SIPARI serta publikasi dan sosialisasi SIPARI.

Upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain peningkatan fasilitas Pos Pelayanan Terpadu, Reviu Standar Pelayanan dan Tindak Lanjut Hasil SKM, dll.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Pencapaian IK 17 didukung oleh anggaran sebesar Rp 9.454.000,00 dan sampai dengan triwulan III 2024 serapan anggaran sebesar Rp 9.442.500,00 atau 99,88%. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran akan dihitung pada akhir tahun anggaran. Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Pencapaian IK ini didukung oleh 32 (tiga puluh dua) orang petugas pelayanan publik berdasarkan Surat Tugas Nomor 53/PPN.PRG/KP.440/I/2024. Penggunaan aplikasi SISUSAN meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan SKM, baik dari segi SDM maupun waktu.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program layanan dukungan manajemen internal - layanan organisasi dan tata kelola internal melalui kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di PPN Prigi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 14.760.816.000 sesuai dengan DIPA PPN Prigi TA.2024 dengan nomor DIPA : SP DIPA-032.03.2.427670/2024 tanggal 24 November 2023. Anggaran tersebut terbagi dalam 5 (lima) kegiatan utama sebagai berikut :

- Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan
- Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
- Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan
- Pengelolaan Sumber Daya Ikan
- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Capaian pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan III 2024 adalah sebesar Rp 11.655.449.245,00 atau sebesar 78,96% dari total PAGU Anggaran Tahun 2024.

Tabel 13. Penyerapan Anggaran berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan Utama Triwulan III 2024

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	38.000.000	30.441.000	80,11%
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1.621.527.000	993.718.707	61,28%
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000	1.800.000	45,00%
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	37.740.000	19.645.800	52,06%
5	Program Dukungan Manajemen Internal	13.059.549.000	10.609.843.738	81,24%
	Jumlah	14.760.816.000	11.655.449.245	78,96%

Target anggaran yang ditetapkan, direncanakan untuk menghasilkan capaian kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan triwulan III 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program layanan dukungan manajemen internal - layanan organisasi dan tata kelola internal melalui kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 14. Penyerapan Anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan Triwulan III 2024

No	Sasaran Kegiatan	Target Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran TW III Tahun 2024 (Rp)	NPSS	% Realisasi Anggaran
1	Nilai PNBP sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Prigi	186.602.000	87.640.000	120%	46,97%
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Prigi Meningkat	10.000.000	9.708.500	120%	97,09%
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Berdaya Saing	641.621.000	382.091.025	114,58%	59,55%
4	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal	831.864.000	545.433.492	120%	65,57%

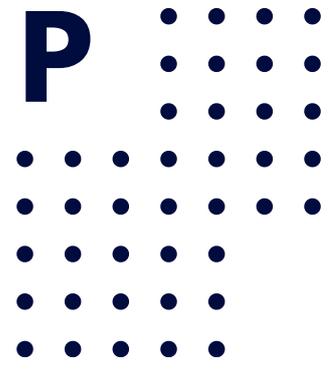
Lanjutan Tabel 14. Penyerapan Anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan Triwulan III 2024

No	Sasaran Kegiatan	Target Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran TW III Tahun 2024 (Rp)	NPSS	% Realisasi Anggaran
5	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	25.000.000	17.441.000	117,98%	69,76%
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi / Terlindungi di PPN Prigi	13.000.000	13.000.000	-	100%
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Prigi	13.052.729.000	10.600.135.238	112,57%	81,21%
Jumlah / Persentase		14.760.816.000	14.760.816.000	117,52%	78,96%



BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP



4.1. Kesimpulan

Dalam mewujudkan Pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah direncanakan. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur.

Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Triwulan III 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program dan target pada Indikator Kinerja selama triwulan III 2024. Terhadap capaian Indikator Kinerja tersebut dilakukan analisis dan evaluasi, serta perbandingan terhadap target tahunan dan capaian Indikator Kinerja pada tahun sebelumnya, target akhir Renstra, dan capaian satker lain yang memiliki karakteristik hampir sama sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan. Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2024 secara keseluruhan dinyatakan tercapai.

Pada triwulan III 2024, Nilai Capaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar ditandai dengan Nilai Capaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 117,52% dan sampai dengan Triwulan III sebesar 117,30%. Berdasarkan target pada rencana aksi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2024, terdapat 18 (delapan belas) Indikator Kinerja yang mendukung 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan memiliki capaian >100%. Pada triwulan III 2024 terdapat 7 (tujuh) indikator dengan pengukuran bersifat triwulan. Sedangkan 11 (sebelas) indikator dengan pengukuran bersifat semester dan tahun.

Dalam pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi terdapat beberapa kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Pendaratan ikan dilakukan di beberapa titik pendaratan sehingga kemungkinan terjadi hilang data;
- Masih terdapat pegawai yang memiliki IP ASN rendah dan sedang;
- Pengetahuan *stakeholder* tentang ketentuan pelayanan, media layanan pengaduan, dan proses pengisian SKM secara online perlu ditingkatkan.



Hal ini menunjukkan perlu upaya yang lebih besar untuk dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan pada periode selanjutnya. Upaya-upaya dimaksud disampaikan pada langkah-langkah perbaikan.

4.2. Tindak Lanjut Periode Sebelumnya

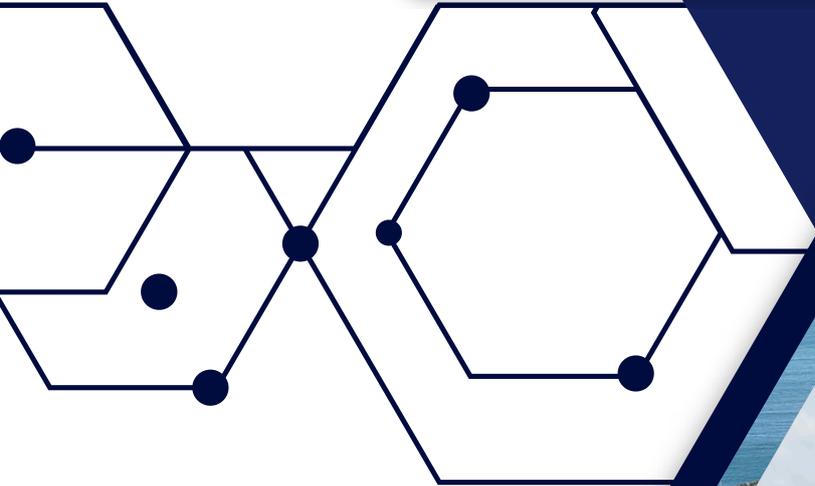
Rekomendasi perbaikan pada periode sebelumnya (triwulan II tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti pada periode triwulan III tahun 2024 yaitu :

- Melaksanakan koordinasi dengan nelayan, pengepul, dan stakeholder lainnya dengan tujuan penertiban kegiatan bongkar dan memaksimalkan pendataan hasil tangkapan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan input data PIPP dan capaian tingkat kinerja bulanan;
- Menyusun analisa berupa rekomendasi dan upaya peningkatan capaian IP ASN serta melaporkan anomali dan melakukan pemantauan terkait perbaikannya;
- Melakukan pemantauan secara berkala capaian realisasi terhadap rencana RPD Halaman III DIPA per jenis belanja;
- Melakukan Akselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban tepat waktu sehingga proses revolving UP/TUP maupun LS dapat dilakukan dengan cepat.

4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan pembahasan pencapaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi triwulan III 2024, rekomendasi / hal-hal yang disarankan untuk peningkatan kinerja guna pencapaian target tahun 2024 sebagai berikut :

- Melaksanakan koordinasi dengan nelayan, pengepul, dan stakeholder lainnya dengan tujuan penertiban kegiatan bongkar dan memaksimalkan pendataan hasil tangkapan (lanjutan koordinasi I);
- Menerbitkan memorandum Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai serta monitoring dan evaluasi secara berkala;
- Melaksanakan publikasi ketentuan pelayanan, media layanan pengaduan, dan proses pengisian SKM secara online, dan lainnya.



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ririn Sugihariyati**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Prigi


Ririn Sugihariyati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	1	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Rp Juta)	1.207,96
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)	20.046
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Berdaya Saing	3	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	45
4	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	70
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	30,10
5	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	377
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/ Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan (Persen)	24,5
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	80
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80
		12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	94
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	84
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	93,76
		17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	86
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	88,30		

Data Anggaran :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	38.000.000
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1.621.527.000
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	37.740.000
5	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	13.059.549.000
Total Anggaran Tahun 2024		14.760.816.000

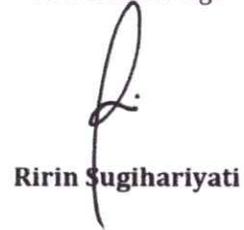
Jakarta, 21 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Prigi



Ririn Sugihariyati

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Satuan target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala												
							Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan PPN Prigi	17 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2342.EBD.953.053.A Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran	37.000.000	1	Kegiatan													1
			2342.EBC.954.055.A. Pelaporan Keuangan Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	57.380.000	1	Kegiatan													
	18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2342.EBA.960.053.A Koordinasi terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	7.000.000	1	Kegiatan						1							
			Jumlah			14.760.816.000													



Trenggalek, Januari 2024
Kepala Pelabuhan

Triin Sugiharyati
NIP. 19671101 199803 2 002



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : B.3101/DJPT.1/KP.540/VII/2024

diberikan kepada :

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI

atas prestasinya sebagai

“Unit Kerja Pengelola Kepegawaian Terbaik II”

Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Jakarta, 01 Juli 2024

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap


TRIAN YUNANDA, S.Pi, M.Sc
NIP. 197406201999031004


#2024 BerAKHLAK #BanggaBerkarya
KPP BEYOND

Penghargaan Anugerah Terbaik ke I - Kategori Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Periode Semester I TA 2024 Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap





SERTIFIKAT PENGHARGAAN



Dengan bangga diberikan kepada

PPN Prigi

Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan Perikanan
periode bulan Juli 2024
dengan kategori :

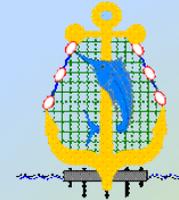
SANGAT BAIK

Jakarta, 7 Agustus 2024

Direktur Kepelabuhanan Perikanan



Tri Aris Wibowo



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Dengan bangga diberikan kepada

PPN PRIGI

Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan Perikanan
periode bulan Agustus 2024
dengan kategori :

Sangat Baik

Jakarta, 7 September 2024

Direktur Kepelabuhanan Perikanan



Tri Aris Wibowo



SERTIFIKAT

Penghargaan

Diberikan Kepada:

PPN PRIGI

Dengan Kategori :

SANGAT BAIK

Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan Perikanan
periode bulan September 2024

Jakarta, 7 Oktober 2024

Direktur Kepelabuhanan Perikanan

TRI ARIS WIBOWO